

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah merupakan kebutuhan primer manusia yang memiliki fungsi sebagai tempat tinggal dan menetap. Sebagai kebutuhan primer, rumah harus memenuhi persyaratan-persyaratan rumah layak huni (RLH). Menurut UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman rumah layak huni (RLH) adalah rumah yang memenuhi persyaratan kekuatan dan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan penyediaan sanitasi dan air minum yang memadai. Namun di desa – desa terpencil di Indonesia khususnya Provinsi Lampung masih terdapat rumah tidak layak huni (RTLH). Maka dari itu Kementerian Direktorat Jendral Perumahan PUPR membuat program BSPPS sebagai bentuk pengurangan rumah tidak layak huni.

Dalam menciptakan rumah yang layak huni diperlukan adanya pengendalian mutu agar pembangunan rumah swadaya yang dikerjakan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan spesifikasi pembangunan rumah layak huni. Pengendalian mutu berfungsi untuk membuat konstruksi bangunan sesuai dengan mutu dan spesifikasi. Pengendalian mutu dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengembangkan kinerja suatu perusahaan. Pengendalian mutu dilakukan berguna untuk mencapai suatu hasil pekerjaan yang sesuai dengan mutu dan spesifikasi. Pengendalian mutu merupakan kegiatan *Quality Control* (QC) yang meninjau kualitas dari bahan, alat dan semua faktor yang terlibat dalam konstruksi tersebut. Prayogi dan Lubis (2019) menyatakan bahwa pengendalian mutu merupakan kegiatan yang meliputi tindakan monitoring, inspeksi, pengecekan serta pengujian untuk mengendalikan dan memastikan bahwa mutu bahan, metode pelaksanaan, serta hasil pekerjaan telah mencapai sasaran. Mutu merupakan indikator dan tujuan keberhasilan suatu proyek konstruksi.

Seiring dengan pesatnya pembangunan rumah, kecepatan dalam pembangunan rumah yang memiliki kontrak dengan waktu tertentu sehingga jaminan dan pengendalian mutu harus dituntut lebih tinggi. Salah satu bentuk

realisasi dalam menghadapi pembangunan rumah yang menggunakan kontrak dengan waktu tersebut disusunlah suatu pengendalian mutu.

Namun pada kenyataan di lapangan meskipun pengendalian mutu dan persyaratan spesifikasi teknis telah disusun, penyimpangan – penyimpangan terhadap mutu pada saat pelaksanaan masih sering terjadi, sehingga mutu dari bangunan yang dihasilkan tidak sesuai dengan persyaratan dan spesifikasi yang telah ditetapkan.

Seperti halnya pada program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) yang menggunakan kontrak waktu dari Kementerian Direktorat Jenderal PUPR dalam menjalankan konstruksi pembangunan rumah swadaya. Waktu yang diberikan dalam proses pembangunan rumah swadaya sekitar 5 bulan. Provinsi Lampung salah satu provinsi yang diberikan kesempatan dari pihak PUPR untuk mendapatkan program bantuan BSPS tersebut kepada masyarakat Provinsi Lampung. Berdasarkan data NAHP (*National Affordable Housing Program*) pada tahun 2022 Provinsi Lampung sudah merealisasikan 1852 rumah yang tidak layak huni menjadi rumah layak huni. Data tersebut menunjukkan bahwa di Provinsi Lampung masih banyak rumah yang tidak layak huni. Data dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1 Tabel realisasi progress kegiatan BSPS tahun 2022 (sumber: *nahp.pu.go.id*)

Provinsi	Realisasi
Aceh	503
Sumatera Selatan	1.440
Sumatera Barat	1.828
Riau	714
Bengkulu	2433
Kepulauan Bangka Belitung	900
Lampung	1.852

Peneliti memilih lokasi Provinsi Lampung untuk penelitian tersebut dikarenakan jumlah rumah yang berhasil direalisasikan pada tahun 2022 sangat besar yaitu 1.852 rumah. Hal tersebut dapat terjadi penyimpangan – penyimpangan

mutu pada proses pelaksanaan konstruksi berlangsung. Peneliti juga diberi kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Provinsi Lampung, sehingga peneliti dapat mengkaji lebih lanjut mengenai pengendalian mutu pembangunan rumah swadaya di Provinsi Lampung.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengendalian Mutu Pembangunan Rumah Swadaya Dalam Mengatasi RTLH di Provinsi Lampung”, karena penelitian ini merupakan penelitian yang baru untuk program BSPS dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi bidang teknik sipil untuk mendapatkan pengetahuan terkait pengendalian mutu yang dapat diterapkan pada program BSPS di wilayah Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pengendalian mutu pada pembangunan rumah swadaya?
2. Bagaimana hasil persentase hasil pengendalian mutu pembangunan rumah swadaya pada 4 jenis rumah di Kabupaten Lampung Barat berdasarkan kriteria Rumah Layak Huni ?
3. Bagaimana perbandingan rumah sebelum dilakukan pembangunan (RTLH) dan setelah dilakukan pembangunan rumah swadaya yang memenuhi kriteria (RLH) berdasarkan tampak depan, tampak perspektif lain dan tempat sanitasi?

1.3 Lingkup Penelitian

Lingkup Penelitian pada penelitian ini adalah :

- a. Sosialisasi mengenai rumah layak huni sebelum dilaksanakan pekerjaan pembangunan rumah swadaya
- b. Sosialisasi mengenai pembangunan rumah yang tahan gempa sesuai dengan Lampiran II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/PRT/M/2016 Tahun 2016.
- c. Pengendalian mutu pembangunan rumah swadaya sesuai dengan jenis rumah.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian adalah :

- a. Menganalisis pelaksanaan pengendalian mutu pada pembangunan rumah swadaya di desa Serungkuk Kabupaten Lampung Barat
- b. Menganalisis perbandingan rumah sebelum dilakukan pembangunan (RTLH) dan setelah dilakukan pembangunan rumah swadaya yang memenuhi kriteria (RLH) berdasarkan tampak depan, tampak perspektif lain dan tempat sanitasi

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini didapat dari rumusan masalah serta tujuan yaitu sebagai berikut :

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dibidang teknik sipil untuk mendapatkan pengetahuan terkait pengendalian mutu yang dapat diterapkan pada program BSPS di wilayah Indonesia
- b. Penelitian ini dapat memberikan ilmu kepada masyarakat tentang pengendalian mutu pada pembangunan rumah sederhana
- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi tolak ukur pengendalian mutu pembangunan rumah swadaya pada program BSPS di seluruh wilayah Indonesia atau kepada masyarakat non program bantuan.